

## PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PANGAN BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

### Dasar Hukum:

- 1. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 2. PP 52 Tahun 2011 tentang Perubahan SOP OPD
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian.
- 4. PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan
- 5. Permentan 48/Permentan OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (Good Agriculture Practices for fruit and vegetables)

### Keterkaitan:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan
- 2) SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No 188.44/169/PANGAN/2018 Tentang Pembentukan Tim Jejaring Keamanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## Peringatan:

SOP ini sangat penting untuk melihat terhadap aktivitas/kegiatan yang telah dilakukan selama tahun berjalan

Nomor SOP	: 38 /SOP.Konsumsi/2020
Tanggal Pembuatan	: / Oktober 2018
Tanggal Revisi	: 3 Februari 2020
Tanggal Efektif	: 3 Februari 2020
Disahkan oleh	: Kepala Dinas Pangan

Ir. AHMAD DAMIRI Pembina Utama Madya/IV.d NIP. 19610905 199003 1 006

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

# Pengawasan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah

### Kualifikasi Pelaksana:

- 1) Anggota Tim JKPD Provinsi
- Petugas Pangambil Contoh (PPC)
- 3) JFT PMHP
- 4) Pelaksana Kegiatan

## Peralatan/Perlengkapan:

- Komputer dan Alat Tulis Kantor
- Renstra Dinas Pangan Provinsi Kepulaun Bangka Belitung
- Cheklist pengawasan
- Alat Uji rapid test kit
- Berita Acara Pengawasan dan Pengambilan Sampel

## Pencatatan dan Pendataan:

Melaksanakan pengawasan keamanan pangan secara rutin di pelaku usaha/pasar modern

NO 1	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		KEPALA DINAS	SEKRETARIS	KEPALA BIDANG	KEPALA SEKSI	PELAKSANA KEGIATAN	TIM JKPD	PELAKU USAHA	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Penyusunan jadwal	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pelaksanaan kegiatan pengawasan Tim JKPD dan Rakor JKPD								<ul> <li>SK Pelaksana Kegiatan</li> <li>SK JKPD</li> <li>Data pelaku usaha</li> <li>Ceklist Pengawasan</li> </ul>	1 Hari	Draft rincian kegiatar
2	Penyampaian draft jadwal pengawasan Tim JKPD dan Rakor JKPD								<ul> <li>Jadwal pelaksanaan kegiatan</li> <li>Ceklist Pengawasan</li> <li>Berita acara Pengawasan</li> </ul>	1 hari	Draft jadwal kegiatan
3.	Koordinasi dengan kabid untuk jadwal pelaksanaan kegiatan Tim JKPD			T					<ul> <li>Jadwal pelaksanaan kegiatan</li> <li>Nama-nama Tim JKPD yang akan ikut serta</li> <li>Pembagian Tim yang akan turun ke lapangan</li> </ul>	2 Jam	Jadwal pelaksanaan kegiatan dan draft pembagian Tim Pengawasan
4	Persetujuan berkas administrasi untuk kegiatan operasional Tim JKPD						T. T.		berkas administrasi (surat menyurat)	30 menit	Berkas administrasi disetujui
	Permohonan penandatanganan surat ke Tim JKPD dan Penerbitan ST	<b>○</b> •							Surat pemberitahuan jadwal pengawasan Tim JKPD dan Rakor JKPD     Surat Tugas	20 menit	Surat tugas dan surat pemberitahuan ditandatangani
	Pelaksanaan pengawasan Tim JKPD ke pelaku usaha/Pasar Modern dan pertemuan Rakor JKPD						P		Surat Tugas Tim JKPD     Data pelaku     usaha/pasar modern     yang akan dikunjungi	15 menit	Surat tugas dan Berita acara pengawasan
	Penyampaian hasil pengawasan Tim JKPD ke pelaku usaha								Berita acara Pengawasan Termasuk temuan ketidaksesuaian	20 menit	Hasil Temuan Ketidaksesuaian
3 1	Pembuatan rekomendasi	YAL EE			İ				- Surat teguran terhadap	3 hari	Draft Surat teguran

	terhadap hasil temuan ketidaksesuaian di lapangan dan jadwal takor JKPD				hasil temuan di pelaku usaha		terhadap pelaku usaha
9.	Penandatanganan surat teguran ke pelaku usaha dan acara Rakor JKPD	$\Diamond$			- Surat teguran terhadap hasil temuan di pelaku usaha	30 menit	Surat Teguran
10	Penyampaian surat teguran ke pelaku usaha				<ul> <li>Surat teguran terhadap hasil temuan di pelaku usaha</li> </ul>	1 hari	Surat teguran

. . /